

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- BPKPAD Kabupaten Purworejo. (2020, Juli 2). *Konfirmasi Data Piutang PBB P2 dan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan*. Diambil kembali dari <https://bppkad.purworejokab.go.id/2020/07/02/konfirmasi-data-piutang-pbb-p2-dan-data-objek-pajak-bumi-dan-bangunan/>
- BPKPAD Kabupaten Purworejo. (2021, Oktober 19). *Implementasi smart map untuk intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan*. Diambil kembali dari <https://bppkad.purworejokab.go.id/2021/10/19/implementasi-smart-map-untuk-intensifikasi-pajak-bumi-dan-bangunan/>
- Darnita, C. D., & Mangoting, Y. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangkaraya. *Tax & Accounting Review, Vol 4*, 1-8.
- Gunadi, D. (2005). *Administrasi Pajak*. Jakarta: BPPK Departemen Keuangan RI.
- Hadi, M. (2001). *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hansen, & Mowen. (2007). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Konsultan IT Aplikasi Pemda. (2021). *Aplikasi SIG PBB*. Diambil kembali dari E Government Smart Tax: <https://www.aplikasipemda.com/aplikasi-smartmap/>
- Konsultan IT Aplikasi Pemda. (2021). *Aplikasi SIG-PBB*. Diambil kembali dari E-Government Smart Tax: <https://www.aplikasipemda.com/aplikasi-smartmap/>
- Kurniawan, P., & Pamungkas, B. (2006). *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Latowa, F. S., Kaluku, M. R., & Lahinta, A. (2020). *Sistem Informasi Monitoring Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi.
- Mufaridah, R. (2021). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Nurwantoro, T. (2015). *Kerangka Kerja Sinkronisasi Basis Data Relasional Berbasis Web pada Studi Kasus Sistem Informasi Akademik*.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Purworejo: Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. (2021). Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. *Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo*. Purworejo.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pemkab Purworejo. (2022). Diambil kembali dari <https://purworejokab.go.id/web/letak-geografis.html>
- Resmawan, E. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara dan Jalan di Kabupaten Malinau. *Disertasi*, 30.
- Riyanto, E. S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka di Badan Informasi Publik Kemkominfo. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Rosiandani, Y. (2021). Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Monitoring Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Purnama, B. S. (2018). Pemutakhiran Data Spasial Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BKAD Kabupaten Bantul. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sendari, A. (2021, 09 09). *Sinkron adalah Penyelarasan, Ketahui Fungsinya dalam Teknologi dan Komunikasi*. Diambil kembali dari <https://hot.liputan6.com/read/4653878/sinkron-adalah-penyelarasan-ketahui-fungsinya-dalam-teknologi-dan-komunikasi#:~:text=Data%20sinkron%20adalah%20proses%20membangun,file%20dan%20sinkronisasi%20perangkat%20seluler>.
- Siregar. (2004). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Supramono, & Damayanti, T. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Syaukani, d. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi*, 573.
- Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wikipedia. (2021). *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Purworejo*. Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:History/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Purworejo